

© 2004 T. Ersti Yulika Sari
Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng, M F (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto, M.Sc
Dr. Ir. Hardjanto, M.S

Posted: 15 December, 2004

MENGAPA NELAYAN MISKIN ? (SUATU TINJAUAN PERMASALAHAN)

Oleh:

T. Ersti Yulika Sari

C561040021

nonnysaleh@hotmail.com

1. Pendahuluan

Terdapat 6 alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi untuk dibangun. **Pertama**, Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. **Kedua**, Indonesia memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi dan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya. **Ketiga**, industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan (*backward and forward linkage*) yang kuat dengan industri-industri lainnya. **Keempat**, sumberdaya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang selalu dapat diperbaharui (*renewable resource*) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif. **Kelima**, investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relatif tinggi sebagaimana dicerminkan dalam *Incremental Capital Output Ratio*

(ICOR) yang rendah dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. **Keenam**, pada umumnya industri perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan input rupiah namun dapat menghasilkan output dalam bentuk dolar (**Dahuri, 2004**).

Sejalan dengan misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu *social equity, economic growth, environmental sustainability*, peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan, peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia. Seringkali pengaturan kegiatan manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya ikan menjadi sangat penting dan patut diutamakan. Begitu pentingnya faktor manusia ini sehingga kunci sukses pengelolaan sumberdaya perikanan bukan terletak pada sumberdaya ikannya, tetapi terletak pada sumberdaya manusia yang memanfaatkannya. Manusia yang memanfaatkan sumberdaya ikan memiliki emosi, strategi, intrik, taktik, tujuan, visi, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, pengalaman, keinginan, dan perasaan yang semuanya secara bersama-sama menentukan sikap mereka dalam memanfaatkan sumberdaya itu (**Nikijuluw, 2002**).

Namun demikian komitmen pendayagunaan sumberdaya masih kurang. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya bahwa nelayan selaku aktor utama di sektor ini masih berada dibawah garis kemiskinan.

Analisis yang berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan ini, dalam mempersiapkan sektor perikanan menghadapi perdagangan bebas dunia. Dengan menggunakan *Problem Tree Analysis* (PTA)

akan dicoba menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan kehidupan nelayan masih berada dibawah garis kemiskinan.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi dari beberapa permasalahan dapat dirumuskan bahwa 1) nelayan masih berada pada tingkat penghidupan yang masih rendah jika boleh dikatakan masih miskin, 2) sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun non pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan nelayan.

3 Tujuan Penulisan

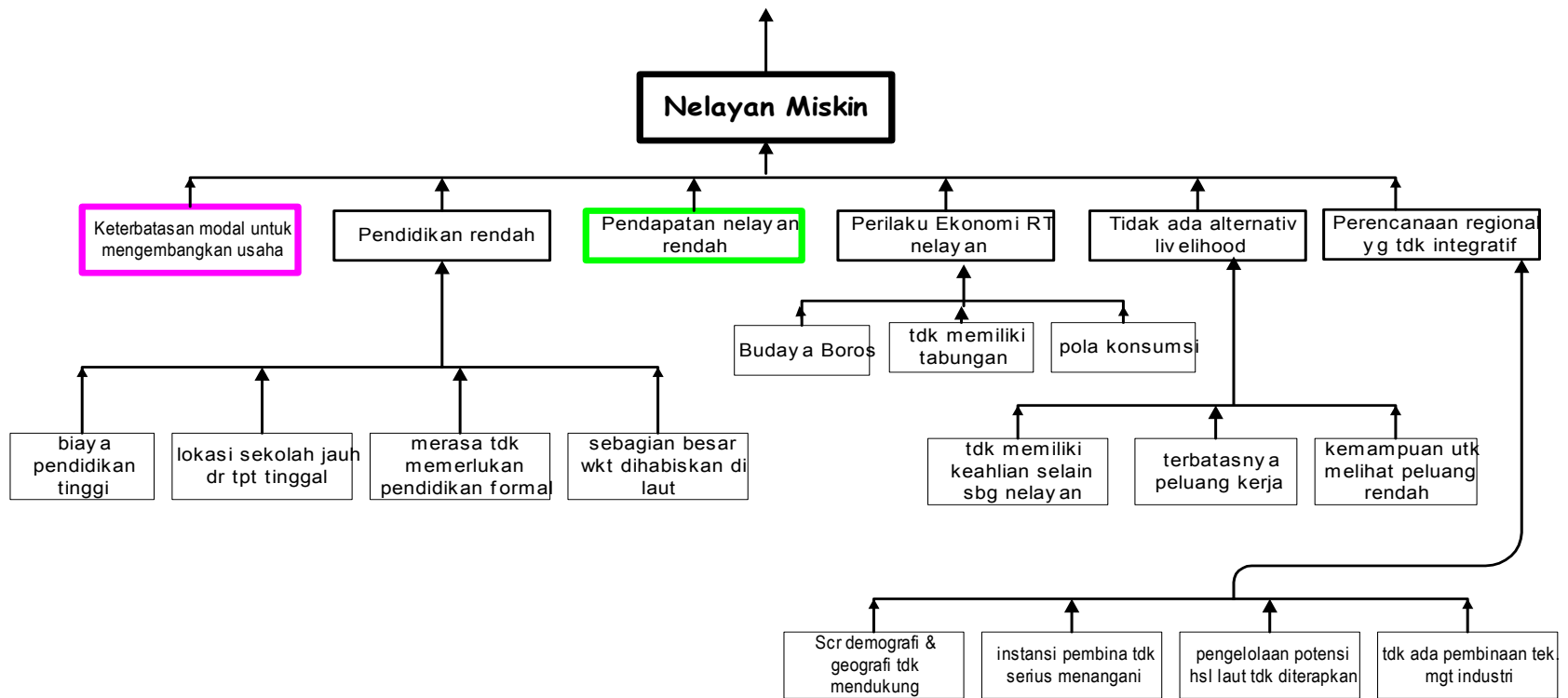
Tujuan dari penulisan ini adalah tindakan sistematis yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan ; 1) mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan masyarakat nelayan secara internal dan eksternal, 2) mengidentifikasi terhambatnya peran lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Diharapkan akan diketahui penyebab munculnya keadaan dimana nelayan mengalami kesulitan ekonomi dan solusi pemecahannya.

4 Pendekatan Masalah

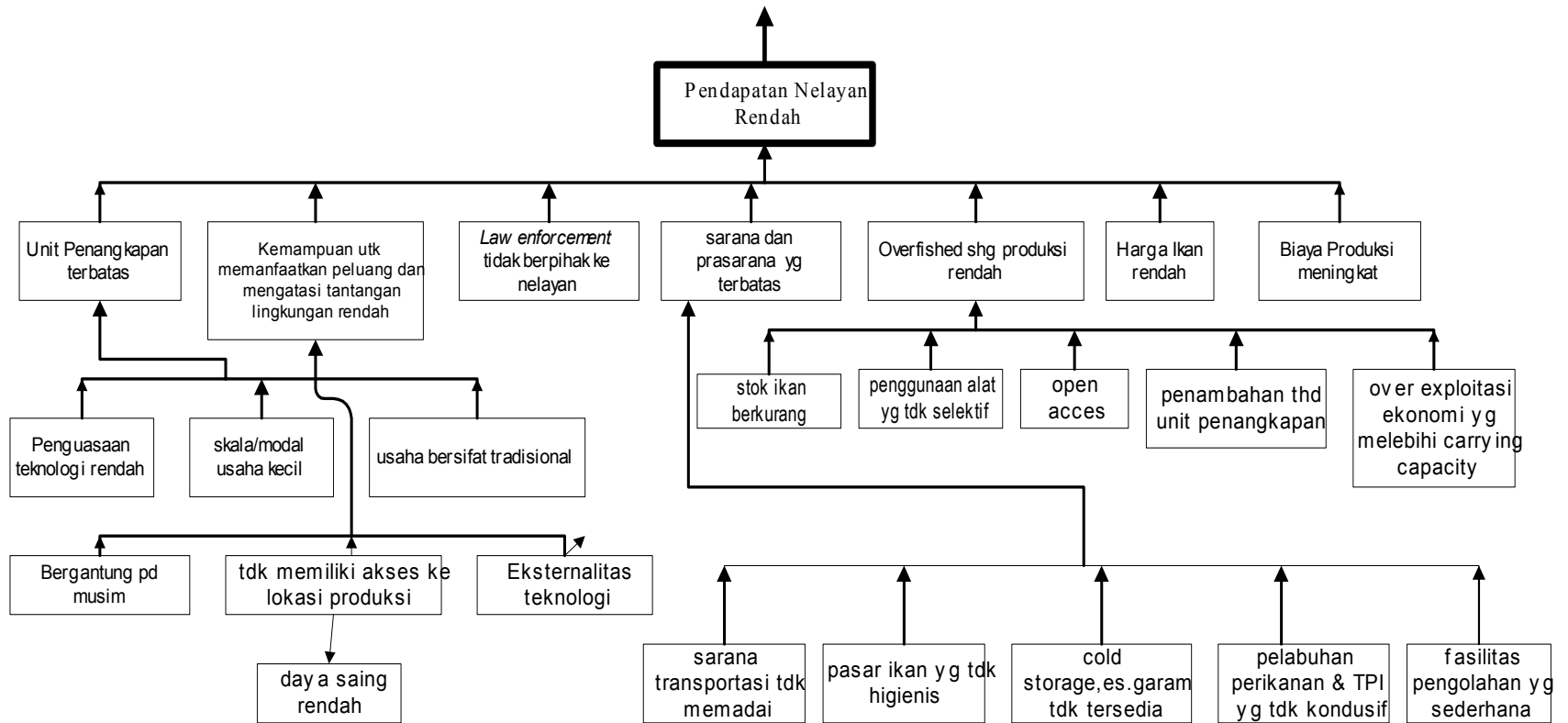
Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Dari status penguasaan kapital, nelayan dapat dibagi menjadi nelayan tradisional dan nelayan buruh.

Nelayan tradisional secara umum merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk tingkat kesejahteraannya, sementara kondisi ini sangat dekat dengan tekanan ekonomi, pendapatan yang tidak menentu sehingga menyebabkan rendahnya perolehan rumah tangga dari aktivitas sebagai nelayan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik positif maupun negatif.

Problem Tree Analysis pada **Gambar 1** mencoba menguraikan faktor-faktor yang paling mendasar sebagai indikator dari kemiskinan nelayan yaitu **a) Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha**. Hal ini disebabkan oleh tanggungan keluarga yang tinggi. Selain biaya kehidupan nelayan yang banyak hal ini diperburuk lagi dengan jumlah anak yang mereka miliki. Selain itu sumber pendapatan diperoleh dari satu orang. Keadaan ini dimungkinkan oleh usia anak yang relatif masih kecil ataupun tidak adanya keinginan dari anggota keluarga lainnya menjadi nelayan. Keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak dimilikinya akses ke pelayanan kredit (**Gambar 2**). Selain kurangnya informasi mengenai pengajuan kredit juga dikarenakan ketidakmampuan nelayan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh pihak pemberi kredit, **b) Tingkat pendidikan rendah**, Tingkat pendidikan sumberdaya manusia yang rendah merupakan salah satu permasalahan yang juga dapat menyebabkan nilai tambah mengapa nelayan miskin. Biaya pendidikan yang tinggi, lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal merupakan alasan bagi nelayan untuk memilih tidak bersekolah. Selain itu nelayan merasa tidak memerlukan pendidikan formal karena sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan di laut.



Gambar 1. Faktor-faktor Penyebab Nelayan Miskin



Gambar 2. Faktor-faktor Penyebab Nelayan Miskin dilihat dari Pendapatan Nelayan

3) pendapatan yang rendah. Pendapatan nelayan produsen sebagai pelaku utama sudah selayaknya jika barang yang sulit didapat dan besar permintaan maka tinggi harganya. Konsekuensinya produsen akan memiliki pendapatan yang tinggi dan penghidupan yang sejahtera. Namun fakta menunjukkan bahwa nelayan termasuk kelompok miskin di semua negara. Bahkan atribut bagi mereka adalah termiskin diantara yang miskin "*the poorest of the poor*". Kemiskinan itu terjadi karena nilai tukar nelayan yang rendah yang disebabkan komoditas yang mereka hasilkan dibayar murah (Nikijuluw, 2002). Pomeroy and Williams, 1999 dalam Nikijuluw 2002, menyatakan bahwa keberhasilan manajemen sumberdaya perikanan lebih bergantung pada keterlibatan atau partisipasi pemegang kepentingan (*stakeholder*). Jika nelayan adalah salah satu pemegang kepentingan tersebut, biarkanlah nelayan memutuskan sendiri keinginan dan tujuannya. Jika keinginannya untuk meningkatkan pendapatan, hal tersebut harus ditempatkan sebagai salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Berdasarkan PTA pada **Gambar 2** faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah antara lain adalah unit penangkapan yang terbatas yang dikarenakan penguasaan teknologi yang rendah, skala usaha/modal yang dimiliki kecil dan masih bersifat tradisional, kemampuan nelayan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengatasi tantangan lingkungan yang rendah dikarenakan masyarakat yang masih bergantung pada musim penangkapan, dalam penentuan *fishing ground* nelayan yang mempunyai izin untuk melakukan operasi di tempat tersebut akan memperoleh hasil yang banyak, tetapi bagi nelayan yang tidak memiliki akses ke lokasi yang produktif tersebut selain hasil tangkapan yang

tidak maksimal juga biaya operasi yang tinggi. Eksternalitas teknologi terjadi karena nelayan cenderung melakukan penangkapan ikan pada lokasi yang sama atau setidaknya saling berdekatan satu dengan yang lain sehingga terjadi pertemuan antara alat tangkap ikan yang digunakan yang menjurus pada kerusakan atau perusakan (**Nikijuluw, 2002**). Faktor lainnya adalah *law enforcement* yang tidak berpihak kepada nelayan, diantaranya terjadinya ego sektoral, regulasi yang tidak mendukung, terbatasnya peran kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah, penetapan bahan baku (ikan) yang kurang adil, belum diteapkannya undang-undang anti monopoli, pembagian keuntungan yang tidak proporsional dan kebijakan ekonomi secara mikro yang lebih banyak memberikan kerugian di pihak nelayan dibandingkan memberikan keuntungan

Tetapi apabila kita melihat pada pemenuhan sarana dan prasarana, ternyata aspek ini pun tidak memberikan kontribusi yang berarti.

Terjadinya *overfished* pada suatu perairan yang menyebabkan rendahnya nilai produksi disebabkan oleh berkurangnya stok ikan, karena pada saat nelayan mengambil ikan dari laut tanpa memperhitungkan akibat pengambilan ikan tersebut menyebabkan nelayan lain mengalami kerugian karena berkurangnya ikan, dilain pihak masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak selektif, terjadinya *open acces* di perairan tersebut, adanya usaha penambahan terhadap unit penangkapan serta terjadinya eksploitasi ekonomi yang melebihi *carrying capacity*. **Nikijuluw 2002**, menyatakan bahwa dalam perhitungan ekonomi peningkatan biaya penangkapan ikan karena mengecilnya stok ikan di laut tidak hanya berpengaruh pada nelayan yang menangkap ikan, tetapi juga nelayan lainnya yang ikut memanfaatkan stok ikan tersebut. Oleh karena setiap

nelayan tidak menyadari adanya peningkatan biaya marjinal akibat aktifitas penangkapan ikan yang dilakukannya, nelayan secara keseluruhan cenderung menempatkan terlalu banyak modal atau kapital pada perikanan. Hal ini berarti eksternalitas cenderung mengarah pada eksploitasi sumberdaya.

Terjadinya peningkatan biaya produksi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terutama mengenai kenaikan harga BBM, permintaan konsumen akan ikan segar, upah tenaga kerja meningkat, selain itu karena adanya persaingan untuk mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak menyebabkan semakin jauhnya fishing ground untuk spesies tertentu yang digemari oleh konsumen. **Nikijuluw 2002**, sifat substraktabilitas merupakan situasi dimana seseorang mampu dan dapat menarik sebagian atau seluruh manfaat dan keuntungan yang dimiliki orang lain. Meskipun para pengguna sumberdaya ini melakukan kerjasama dalam pengelolaan, aksi seseorang memanfaatkan sumberdaya yang tersedia akan berpengaruh negatif pada kemampuan orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya yang sama. Sedangkan derajat aksesibilitas terhadap sumberdaya adalah keterbatasan potensi sumberdaya berarti akses terhadap sumberdaya itu sulit dan mahal.

Faktor lainnya yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah adalah harga jual ikan yang juga rendah. Penetapan harga dasar ikan, nelayan atau pengusaha perikanan memiliki insentif untuk berusaha. Respon nelayan terhadap tingginya nilai jual ikan dapat meningkatkan upaya penangkapan atau melakukan investasi tambahan untuk memperbesar armada kapal atau unit penangkapan. Sebaliknya jika harga ikan terus melemah dan tidak ada kebijakan pemerintah untuk mencegah ataupun berupaya agar harga tersebut tetap dapat memberikan

keuntungan kepada nelayan ataupun pengusaha perikanan maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya minat nelayan ataupun pengusaha untuk melakukan pengembangan usahanya. **Purna 2000**, menyatakan salah satu permasalahan mendasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya yang bergerak dalam skala mikro dan kecil adalah sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan formal. Akibatnya nelayan seringkali terjerat oleh *renteneer* yang menawarkan pinjaman dengan cepat dan mudah namun diimbangi dengan tingkat bunga yang tinggi. Keterbatasan permodalan ini diperburuk dengan sistem penjualan yang cenderung dimonopoli oleh para tengkulak. Akibatnya nelayan tidak memiliki *bargaining power* yang memadai sehingga pendapatan yang diperoleh habis untuk bayar hutang dan makan. Lingkaran kemiskinan ini selalu berputar dan menyebabkan di sektor kelautan dan perikanan lekat dengan kemiskinan.

Peran lembaga perbankan dalam penyaluran kredit komersial untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah tidak efektif. Hal ini disebabkan kecenderungan bank-bank umum mendanai sektor-sektor usaha yang bergerak dalam bidang industri pengolahan hasil laut serta pedagang besar hasil laut yang belum menyentuh pada nelayan secara individu. Hal ini disebabkan oleh kebijakan *Prudential Banking* serta persyaratan pada pemberian kredit yang ditetapkan oleh otoritas moneter yang memberikan batasan gerak bagi perbankan umum untuk dapat menjangkau masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin yang ada di daerah pesisir (**Saleh, 2004**). Selanjutnya dikatakan keterbatasan yang selama ini cukup dominan dalam pemberian kredit kepada masyarakat/pelaku ekonomi di daerah pesisir adalah penyedia jaminan yang merupakan syarat

pemberian kredit oleh bank umum. Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu kelancaran usaha lebih dikenal dengan **kredit produktif** yaitu kredit yang diberikan perbankan guna membantu para pengusaha untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan usahanya yang terdiri dari **kredit investasi** dan **kredit modal kerja**.

4) Perilaku ekonomi rumah tangga nelayan, beberapa alasan yang menjadikan perilaku ekonomi nelayan yang buruk adalah budaya boros, dimana pendapatan hari ini dihabiskan pada hari yang sama pula, tidak ada kesadaran untuk memiliki tabungan, dan pola konsumsi yang cenderung tidak teratur.

5) Tidak ada alternatif *livelihood*, dengan segala bentuk keterbatasannya sehingga nelayan tidak mampu memiliki mata pencaharian lain, keterbatasan tersebut antara lain tidak memiliki keahlian lain selain menjadi nelayan, terbatasnya peluang kerja bagi mereka dan kemampuan melihat peluang kerja yang rendah, **dan**

6) Perencanaan secara regional yang tidak mendukung, dalam menetapkan kebijakannya pemerintah hampir tidak memperhatikan adanya perbedaan mendasar secara demografi dan geografi, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik pada daerah-daerah tertentu, selain itu instansi terkait yang telah ditunjuk selaku pembina terlihat tidak serius dalam menangani hal ini, berbagai kebijakan mengenai pengelolaan hasil laut tidak disosialisasikan ke masyarakat nelayan serta tidak adanya pembinaan mengenai teknologi manajemen industri.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab mengapa nelayan miskin walaupun mereka merupakan aktor utama dalam operasi yang diuraikan dengan

menggunakan *problem tree analysis* dapat diketahui bahwa persoalan yang dihadapi bersifat kompleks selain disebabkan oleh sifat ikan yang cepat membusuk, produksi yang berfluktuasi, akses terhadap modal masih kurang, penanganan pasca panen belum sempurna, teknologi masih sederhana, lokasi terpencar, dan tingkat pendidikan nelayan yang rendah serta ada keterikatan dengan pelepas uang. Sebagai akibatnya kualitas produk yang dihasilkan rendah dengan demikian harga jual produk juga menjadi rendah.

Melihat situasi ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena dinamika permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, maka pembangunannya perlu dilakukan melalui pendekatan sistem, sehingga keputusan yang diambil lebih efektif, komprehensif dan operasional.

5. Metodologi

Pendekatan sistem sangat tepat digunakan untuk memecahkan perihal yang kompleks, dinamis dan probabilistic. Sifat kompleks dapat diamati dari interaksi factor-faktor yang terkait sangat rumit. Ciri khas suatu permasalahan bersifat dinamis yaitu adanya factor-faktor yang berubah menurut waktu dan diikuti oleh adanya proses dugaan masa yang akan datang. Probabilistik ditandai oleh ketidakpastian melalui penggunaan fungsi peluang dalam mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Metoda sistem dimulai dengan dilakukannya analisis kebutuhan, identifikasi sistem, pemodelan sistem, verifikasi, implementasi dan diakhiri dengan evaluasi secara periodic terhadap model pengambilan keputusan yang akan dikembangkan.

Sistem adalah suatu gugus elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian hubungan kesesuaian dan kesepadanan menjadi penting dalam identifikasi suatu sistem dimana tidak ada elemen yang ditinggalkan.

Karakteristik Pendekatan Sistem berorientasi tujuan holistik dan efektif. Walaupun demikian suatu sistem mempunyai sekelompok gugus yang terbatas dari elemen-elemennya, sehingga batasan-batasan tersebut dapat digambarkan dengan jelas.

Analisis Kebutuhan

Pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan adalah nelayan, pedagang pengumpul dan perantara, industri pengolahan ikan, industri penunjang, konsumen, Departemen Kelautan dan Perikanan, Koperasi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Kebutuhan masing-masing pihak dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Identifikasi Kebutuhan dari Pihak-pihak yang terlibat

No	Pelaku	Kebutuhan
1	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • pendapatan yg layak bagi nelayan dan keluarga • peningkatan penguasaan teknologi penangkapan dan pasca panen • harga yg stabil dan wajar
2	Pedagang pengumpul dan pengecer	<ul style="list-style-type: none"> • keuntungan penjualan maksimal • kemudahan memperoleh ikan dan produk perikanan • jaminan mutu dan kontinuitas pasokan • tataniaga yang baik dan terjamin
3	Industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • keuntungan maksimal dan insentif investasi • aksesibilitas sumber dana dan teknologi

	ikan	<ul style="list-style-type: none"> • kemudahan prosedur perizinan, investasi, perpajakan, ekspor dan impor bahan penolong
4	Industri penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual produk maksimal • Kelancaran pembayaran dan jasa • Kemudahan prosedur perizinan ekspor dan impor
5	Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • harga yang stabil dan wajar • jaminan kualitas, keamanan, dan kehalalan produk • ketersediaan produk setiap waktu
6	Depatemen Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • produksi ikan dapat memenuhi permintaan pasar • stok populasi ikan lestari
7	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • kemudahan memperoleh informasi harga, produk yang disukai oleh konsumen, sumber teknologi dan finansial • tataniaga perdagangan yang efisien
8	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • perluasan lapangan kerja • pendapatan daerah meningkat • pencemaran lingkungan minim
9	Lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • pengembalian kredit yang lancar • tingkat suku bunga tinggi • jumlah nasabah meningkat

Formulasi Permasalahan

Berdasarkan analisis kebutuhan maka permasalahan dapat diformulasikan sebagai berikut ;

1. Pendapatan nelayan umumnya lebih rendah dari kebutuhan fisik minimum
2. Kualitas sumberdaya manusia belum memadai untuk mengelola dan menjalankan usaha secara profesional
3. Produksi hasil tangkapan berfluktuasi sehingga kontinuitas bahan baku (ikan) sulit dilaksanakan
4. Mutu bahan baku yang dihasilkan rendah sehingga segmen pasar sukar dikembangkan

5. diversifikasi usaha jarang dilakukan sehingga segmen pasar kelas menengah atas sulit dijangkau
6. Peran serta instansi pemerintah dalam pengembangan usaha, teknologi dan manajemen teknologi industri masih belum efektif sehingga perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh lingkungan
7. Teknologi pengolahan masih rendah, sehingga nilai tambah produk sukar ditingkatkan

Identifikasi sistem

Diagram yang digunakan untuk identifikasi sistem adalah diagram lingkaran sebab akibat dan diagram input output. Diagram sebab akibat menggambarkan hubungan antar komponen di dalam sistem peningkatan pendapatan nelayan (**Gambar 3**). Diagram input output menggambarkan masukan dan keluaran serta kontrol dari model ini (**Gambar 4**).

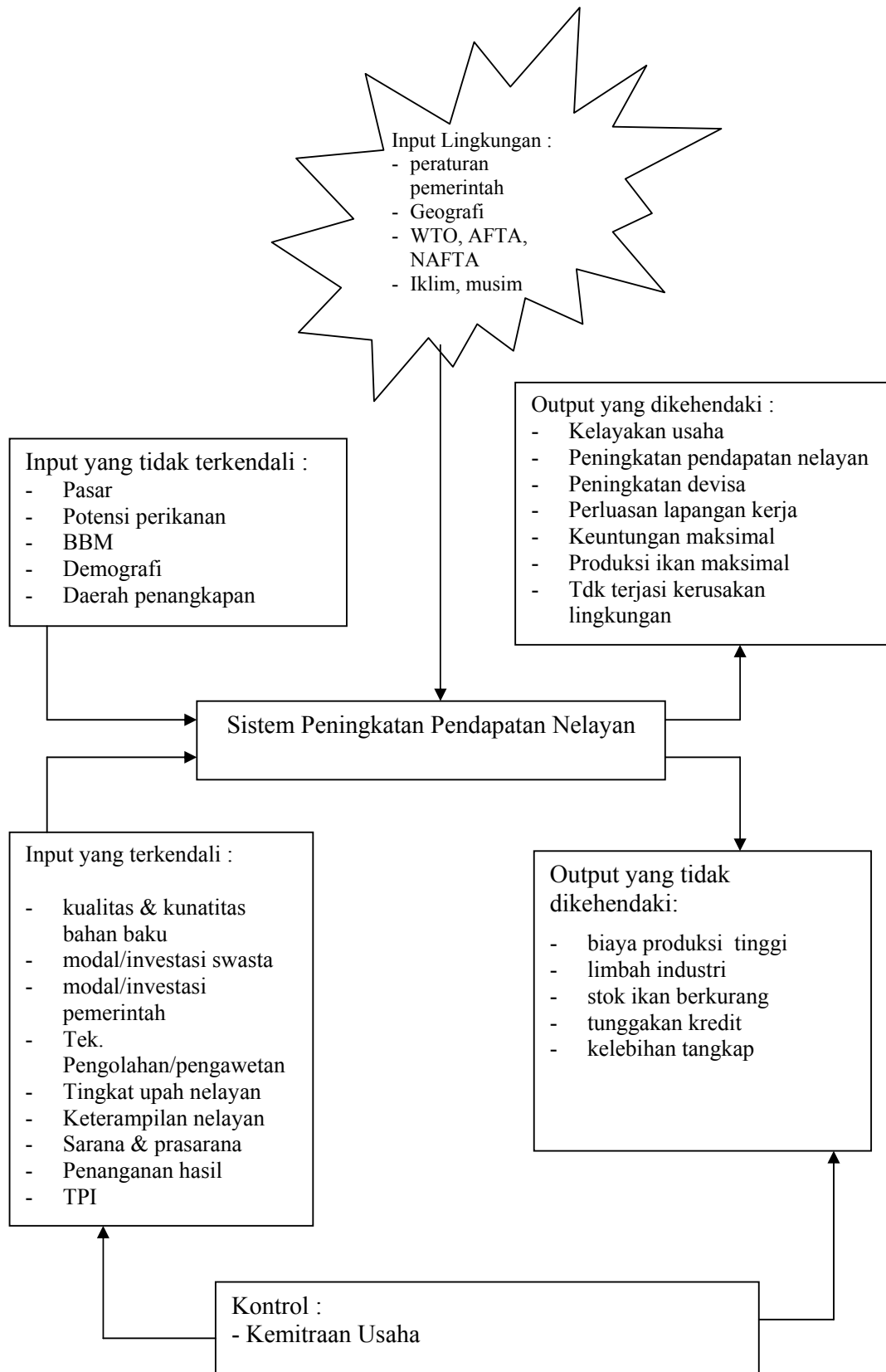
Hasil dan Pembahasan

Penyusunan diagram alir sebab akibat sistem peningkatan pendapatan nelayan harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi sistem. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif terhadap sistem. Faktor-faktor yang memberikan dampak positif diberi tanda positif sedangkan yang memberikan dampak negatif akan diberi tanda negatif (**Gambar 3**).

Penyusunan model pengembangan harus mempertimbangkan pelaku-pelaku yang terlibat dan terkait dalam sistem. Analisis yang menyeluruh mengenai kebutuhan masing-masing pelaku harus dilakukan terlebih dahulu.

Tahap selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah komponen-komponen yang terdapat dalam diagram input output (**Gambar 4**). Tujuan yang hendak dicapai disusun dalam kotak output yang dikehendaki, sedangkan dampak negatif yang mungkin akan timbul disusun dalam kotak output yang tidak dikehendaki yang dapat dikendalikan melalui manajemen yang efektif dan kemitraan usaha.

Input yang tidak dapat dikendalikan adalah pasar, harga BBM dan demografi wilayah tidak boleh diabaikan dalam penyusunan model pengembangan. Input lingkungan juga harus diperhatikan dan diantisipasi dengan seksama seperti *law enforcement*, iklim, dan prosedur serta peraturan perdagangan internasional.



Gambar 4. Diagram Input Output Sistem Peningkatan Pendapatan Nelayan

Pengolahan hasil perikanan merupakan proses yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Hal ini disebabkan karena proses pengolahan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi melalui perbaikan mutu dan nilai guna produk. Permasalahannya, teknologi pengolahan yang dikuasai oleh nelayan bersifat sederhana sehingga produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah seperti yang diharapkan. Agar mendorong peningkatan terhadap mutu produk yang dihasilkan, hendaknya pemerintah mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan secara langsung dan telah dikuasai oleh nelayan. Efisiensi dari penerapan teknologi tersebut dapat dilihat dari nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Pengembangan usaha kecil merupakan hal yang kompleks dan rumit, karena sifat usaha kecil tersebut berada pada status antara keadaan semrawut (*chaos*) ke keadaan yang serba teratur (Eriyatno, 1996).

Bantuan dari pemerintah dapat diberikan kepada pihak swasta (pengusaha kecil) maupun kepada koperasi. Bentuk campur tangan pemerintah ini dapat berupa pemberian kredit produksi dengan bunga rendah tanpa anggunan, pembebasan bea masuk komponen-komponen alat pengolahan dan unit penangkapan, pembebasan PPN penjualan dalam negeri, pengembangan teknologi pengolahan yang tepat guna, penetapan UMR bidang perikanan dan kemudahan perizinan investasi. Peningkatan pendapatan nelayan diukur dari tingkat upah berdasarkan upah minimum regional. Efisiensi tata niaga diukur dari keuntungan masing-masing biaya perniagaan (harga ikan segar, biaya angkut, restribusi TPI) dan keuntungan pedagang pengumpul. Efektifitas ekspor dapat dilihat dari jumlah dan nilai ekspor produk perikanan dan kontribusi ekspor produk perikanan

terhadap PDB nasional. Perluasan lapangan kerja dapat diukur dari persentase angkatan kerja yang terserap. Peningkatan devisa dapat diukur dari persentase peningkatan sumbangan devisa dari ekspor produk-produk perikanan. Parameter kebijakan berdasarkan pada tercapainya seluruh output yang dikehendaki seoptimal mungkin dan menghindari munculnya output yang tidak dikehendaki.

Kesimpulan

Sektor kelautan dan perikanan seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku yang berada di dalamnya. Selain itu diharapkan diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.

Upaya peningkatan pendapatan nelayan harus didukung oleh pemerintah, karena umumnya nelayan tradisional masih lemah dalam hal teknologi dan informasi. Dengan demikian adanya campur tangan pemerintah masih dominan, tetapi hal ini tidak menjadikan over proteksi terhadap nelayan secara berlebihan.

Ketegasan dalam menjalankan penegakan hukum akan membuka kembali peluang investasi dari sejumlah negara pada industri perikanan.

Penyusunan terhadap model pengembangan harus mempertimbangkan pelaku-pelaku yang terlibat dan terkait dalam sistem dan komponen-komponen yang terdapat pada diagram input output. Output yang tidak diinginkan dapat dikendalikan melalui sistem manajemen yang efektif dan kemitraan usaha.

Analisis keberhasilan sistem pengembangan dapat dilakukan dengan menelusuri jalur-jalur keputusan mulai dari pengadaan investasi, tahap operasional hingga output yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Dahuri, Rokhmin. 2004.** Strategi Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Seminar Nasional "Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berbasis Ekonomi Kerakyatan". hal 30-64
- Eriyatno, 1996.** Rekayasa Sistem Perencanaan Industri Kecil. J. Teknol. Ind. Pert. Vol. VI. No I, hal 41-50
- Nikijuluw, V. 2002.** Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R dan PT. Pustaka Cidesindo. Jak-sel. 254 hal.
- Purna, Ibnu.2004.** Menuju Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Proceeding Seminar Nasional "Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berbasis Ekonomi Kerakyatan". hal 73-81
- Saleh, Jamil. 2004.** Peranan Sektor Perbankan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Mendukung Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kerakyatan. Proceeding Seminar Nasional "Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berbasis Ekonomi Kerakyatan". hal 82-89